



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini dalam struktur tata negara Republik Indonesia Pemerintahan kecamatan masih tetap ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah. Dalam pada itu juga menjadi kenyataan bahwa pemerintah kelurahan sebagai alat pemerintah yang ada dan langsung di bawah kecamatan merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang langsung berada di atasnya.

Dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan dewasa ini pemerintahan kecamatan memegang peranan yang sangat menentukan karena bagian terbesar dari potensi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini terdapat di tingkat kelurahan.

Menurut Wismar Purba, Pembangunan kecamatan dapat didefinisikan sebagai :

Keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di kecamatan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik, material maupun mental spritual dalam suatu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu, bertahap, terkordinasi dinamis dan berkelanjutan serta tetap dalam batas-batas kepribadian nasional dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat.”¹

¹ Wismar Purba, *Sustrayawan TNI, Kepdes /Lurah*, MP, 324, Kodam I Bukit Barisan, 1997, hal. 74.



Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan diwujudkan dalam bentuk prasarana dan swadaya gotong royong. Untuk mewadahi partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat diberbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat memperkecil/meniadakan keterbelakangan dan kemiskinan yang masih dirasakan sebagian rakyat Indonesia terutama masyarakat yang berdomisili di pedesaan/kelurahan.

Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan : Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang : ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dimana pelaksanaannya tetap didasarkan atas azas pemerataan di seluruh pelosok tanah air, sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa :

Pembangunan masyarakat perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya sekaligus menciptakan lapangan kerja.